

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis strategi pemenuhan sarana dan prasarana dalam meningkatkan mutu PAUD di Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya. Fokus kajian diarahkan pada tiga aspek utama, yaitu proses perencanaan, pengadaan, dan penggunaan sarana dan prasarana yang meliputi delapan indikator sarana dan prasarana esensial: buku bacaan anak, alat permainan edukatif (APE), fasilitas sanitasi, jaringan listrik, ruang belajar dan bermain, bangunan, lahan, serta perangkat teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Penelitian ini berangkat dari keprihatinan terhadap capaian mutu satuan PAUD yang masih belum optimal, serta adanya tantangan dalam memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP). Berdasarkan hasil temuan dan analisis pada ketiga satuan PAUD yang menjadi objek penelitian, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Gambaran umum sarana dan prasarana

Secara umum, satuan PAUD di Kecamatan Cibeureum telah memiliki sarana dasar seperti ruang kelas, meja kursi, alat kebersihan, APE, dan pojok baca, meskipun kualitas, jumlah, dan pemanfaatannya masih beragam. Penggunaan fasilitas belum sepenuhnya optimal, terutama dalam pemanfaatan APE, buku bacaan, dan TIK sebagai media pembelajaran.

2. Kendala perencanaan sarana dan prasarana

Perencanaan sarana dan prasarana PAUD menghadapi berbagai kendala, terutama keterbatasan anggaran yang menghambat perencanaan menyeluruh dan pemenuhan SNP secara optimal. Keterbatasan lahan dan ruang juga menjadi hambatan fisik dalam pengembangan fasilitas. Selain itu, rendahnya kompetensi guru dalam penggunaan TIK memerlukan perhatian khusus agar perencanaan tidak hanya fokus pada sarana, tetapi juga kesiapan SDM.

3. Strategi Perencanaan sarana dan prasarana

Strategi perencanaan sarana dan prasarana di PAUD Kecamatan Cibeureum dilakukan secara partisipatif dan disusun secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan ketersediaan anggaran. Perencanaan juga mengacu pada prinsip *Developmentally Appropriate Practice* (DAP), dengan menyesuaikan fasilitas terhadap tahap perkembangan dan kebutuhan individu anak. Strategi mendukung perencanaan pendidikan PAUD yang kontekstual dan berkelanjutan.

4. Kendala pengadaan sarana dan prasarana

Pengadaan sarana dan prasarana di satuan PAUD terkendala oleh keterbatasan anggaran, pengalihan dana untuk kebutuhan mendesak, serta ketergantungan pada sumber eksternal selain BOP seperti yayasan, dan orang tua. Selain itu, keterbatasan lahan dan ruang membatasi penyediaan fasilitas belajar yang ideal. Hambatan lainnya meliputi harga tinggi dalam sistem SIPLah serta kurangnya sarana seperti TIK dan bangunan permanen, yang berdampak pada optimalisasi pembelajaran.

5. Strategi pengadaan sarana dan prasarana

Strategi pengadaan dilakukan secara bertahap dan adaptif, mengacu pada prinsip efisiensi, optimalisasi, prioritas kebutuhan dan kualitas pengadaan. Dukungan orang tua dan kreativitas guru menjadi bagian dari strategi fungsional bidang keuangan dan pemasaran, serta strategi tematik berbasis kolaborasi untuk meningkatkan kualitas fasilitas PAUD.

6. Kendala penggunaan sarana dan prasarana

Penggunaan sarana dan prasarana di PAUD Kecamatan Cibeureum masih terkendala oleh keterbatasan ruang dan lahan yang membatasi aktivitas bermain dan belajar anak secara optimal. Selain itu, kondisi bangunan serta sanitasi yang belum ideal, minimnya APE dan buku bacaan, keterbatasan fasilitas TIK menjadi kendala serius. Penggunaan sarana juga belum sepenuhnya dimaksimalkan dalam proses pembelajaran karena keterbatasan dalam pengelolaan dan kompetensi guru.

7. Strategi penggunaan sarana dan prasarana

Strategi penggunaan sarana dan prasarana dilakukan secara adaptif dan kolaboratif melalui optimalisasi ruang, pemanfaatan APE dan media literasi, serta penerapan pembelajaran berbasis area. Penggunaan TIK dikembangkan secara bertahap, dan orang tua serta antar unit yayasan dilibatkan untuk mendukung kegiatan belajar. Strategi ini mencerminkan strategi fungsional dalam pengelolaan SDM.

6.2 Implikasi

1. Bagi Kepala Satuan PAUD

Hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa kepala PAUD perlu memiliki kemampuan manajerial yang adaptif dalam merencanakan, mengadakan, dan menggunakan sarana prasarana secara efektif sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan.

2. Bagi Guru dan Tenaga Kependidikan

Pentingnya keterlibatan guru dalam memanfaatkan sarana prasarana secara kreatif dan kontekstual menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas guru dalam mengelola fasilitas pembelajaran menjadi bagian penting dalam menunjang mutu layanan PAUD.

3. Bagi Pemerintah Daerah

Temuan penelitian mengimplikasikan perlunya dukungan kebijakan dan pendanaan yang lebih memadai, termasuk fasilitasi bantuan sarana esensial, terutama bagi PAUD yang menghadapi keterbatasan lahan, ruang, dan anggaran.

4. Bagi Yayasan dan Masyarakat

Hasil penelitian menggarisbawahi bahwa partisipasi yayasan dan masyarakat, khususnya orang tua peserta didik, menjadi unsur penting dalam pengadaan sarana, sehingga perlu terus didorong melalui pendekatan kolaboratif atau partisipatif dan transparansi perencanaan.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk studi lanjutan yang mengkaji pemenuhan sarana prasarana PAUD secara lebih mendalam, misalnya

dengan pendekatan kuantitatif atau membandingkan antar wilayah untuk merumuskan kebijakan yang lebih komprehensif.

6.3 Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, berikut adalah beberapa rekomendasi yang dapat diajukan untuk meningkatkan strategi pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini (PAUD) di Kecamatan Cibeureum:

1. Kepala satuan PAUD disarankan untuk menyusun pemenuhan sarana dan prasarana secara lebih sistematis dan berbasis kebutuhan riil satuan pendidikan. Hasil penelitian ini merekomendasikan lima langkah dan strategi pemenuhan sarpras: perencanaan berbasis kebutuhan, pengadaan tepat sasaran, pemanfaatan optimal, pemeliharaan rutin, dan evaluasi berkala untuk menjamin mutu layanan PAUD secara berkelanjutan.
2. Pemerintah daerah, khususnya Dinas Pendidikan, diharapkan dapat menambah alokasi bantuan pengadaan sarana dan prasarana esensial PAUD. Bantuan yang diberikan sebaiknya tidak hanya bersifat rutin, tetapi juga mempertimbangkan kondisi aktual satuan pendidikan, seperti keterbatasan lahan, jumlah peserta didik, dan usia bangunan sekolah. Skema bantuan dapat dibuat lebih fleksibel dan berbasis kebutuhan lokal. Selain itu, perlu segera diterbitkan payung hukum mengenai wajib belajar 13 tahun, baik dalam bentuk peraturan daerah (Perda) maupun peraturan wali kota (Perwal), sebagai dasar hukum yang kuat untuk memperkuat posisi PAUD sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional dan prioritas pembangunan daerah.
3. Yayasan penyelenggara PAUD perlu memperkuat peran serta dalam mendukung pengadaan dan pemeliharaan fasilitas pendidikan. Kerjasama antara yayasan dengan kepala satuan PAUD dalam hal pendanaan dan penyediaan sarana akan memberikan dampak positif dalam menjamin kelangsungan mutu layanan pendidikan. Yayasan juga dapat mendorong

partisipasi masyarakat sekitar melalui program kemitraan atau tanggung jawab sosial (CSR).

4. Guru PAUD disarankan untuk meningkatkan keterampilan dalam memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia secara maksimal dan kreatif. Penggunaan alat permainan edukatif (APE), TIK, serta media belajar lainnya perlu disesuaikan dengan karakteristik perkembangan anak usia dini. Pelatihan berkelanjutan mengenai pemanfaatan fasilitas pembelajaran berbasis aktivitas anak dapat mendukung capaian pembelajaran yang lebih optimal.
5. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas kajian pada aspek efektivitas pemanfaatan sarana prasarana terhadap hasil belajar anak di PAUD. Penelitian lanjutan dengan pendekatan kuantitatif atau studi komparatif antar wilayah dapat memperkaya temuan dan memberikan kontribusi terhadap perumusan kebijakan berbasis bukti dalam bidang pendidikan anak usia dini.